



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TIDAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI MULYANI**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **808325**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.325.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , WARISAN Rp. 475.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MAGELANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 469 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 775.000.000
5. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, WARISAN Rp. 525.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 131 m2/80 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 301.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2009, HADIAH Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 53.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 373.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. 5.000.000

Sub Total

Rp. 4.057.000.000

III. HUTANG

Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

4.057.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.